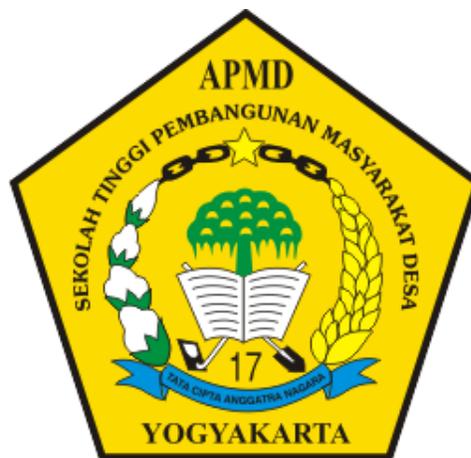


**KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN HOME
INDUSTRY DI KALURAHAN KEMIRI KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun oleh:

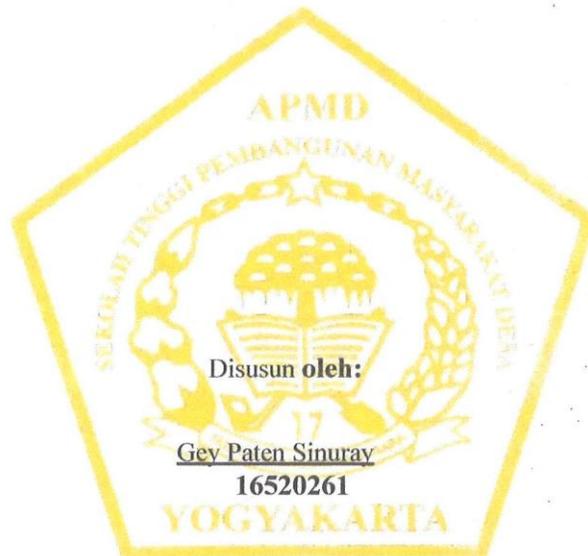
Gey Paten Sinuray
16520261

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN HOME
INDUSTRY DI KALURAHAN KEMIRI KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Februari 2023
Jam : 13.00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Utami Sulistiana, SP., M.P.</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA</u> Penguji Samping I	
<u>Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


(Dr. Cuno Tri Tjahjoko, MA)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gey Paten Sinuray

NIM 16520261

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRY DI KALURAHAN KEMIRI KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Januari 2023 Yang

nbuat pernyataan


Gey Paten Sinuray NIM
16520261

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRY DI KALURAHAN KEMIRI KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**. Penelitian *Deskriptif-Kualitatif* di Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan juga arahan untuk skripsi ini.
4. Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku dosen penguji telah banyak memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku dosen penguji telah banyak memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.

7. Seluruh keluarga besar Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Seluruh penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 07 Januari 2023
Penulis

Gev Paten Sinuray
NIM 16520261

MOTTO

“Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapanmu Tidak Akan Pernah Hilang”

(Amsal 23: 18)

“Hidup Yang Tidak Pernah Dipertaruhkan, Maka Tidak Akan Pernah
Dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sadar, sehat, dan bahagia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam kehidupan penulis:

1. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' Yogyakarta atas banyak ilmu dan perjalanan hidup yang banyak saya dapatkan.
2. Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam bimbingan skripsi ini hingga selesai.
3. Kedua orang tua, skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang istimewa dalam hidup saya. Ayahhanda dan ibunda yang membuat saya bisa sampai di titik ini dan melalui rintangan yang beragam sebelumnya keluarga besar, dan sahabat

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	7
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Literatur Review	5
F. Kerangka Konseptual	10
1. Self Governing Community – Local Self Government	10
2. Kewenangan Desa.....	11
3. Governabilitas	13
G. Fokus Penelitian	14
H. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Unit Analisis	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	17
BAB II.....	19
PROFIL KALURAHAN KEMIRI.....	19
KAPANEWON TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL.....	19

A. Sejarah Kalurahan Kemiri	19
B. Kondisi Geografis Kalurahan Kemiri.....	20
C. Kondisi Demografis Kalurahan Kemiri	20
D. Kondisi Ekonomi Kalurahan Kemiri.....	21
E. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Kemiri	22
F. Profil Usaha Mikro Kecil Menengah Kelompok Batik Sekar Saga.....	25
BAB III.....	28
Perilaku Pemerintah Kalurahan Kemiri Terhadap Pelaku Home Industri di Wilayahnya	28
A. Intervensi Kebijakan Pemerintah Kalurahan Kemiri Dalam Perencanaan dan Program <i>Home Industry</i>	29
B. Peran Pemerintah Kalurahan Kemiri Dalam Akses Pasar Pelaku <i>HomeIndustry</i> 35	
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengembangan <i>Home Industry</i>	40
BAB IV	43
KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Nama Lurah Kemiri.....	19
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kalurahan Kemiri	21
Tabel 2. 3 Pembagian Wilayah Administrasi.....	22
Tabel 2. 4 Daftar Nama dan Pamong Kalurahan	23
Tabel 2. 5 BamusKal Kalurahan Kemiri.....	23
Tabel 2. 6 LPMD Kemiri	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Kemiri	20
Gambar 2. 2 Proses membatik	26
Gambar 2. 3 Produk dari Kelompok Batik Sekar Saga.....	26
Gambar 3. 1 Besaran Dana Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kemiri	36
Gambar 3. 2 Besaran Dana Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kemiri	37
Gambar 3. 3 Event Gelar Atraksi Wisata Budaya dan Uji Coba Show Room UMKM Kemiri	39

INTISARI

Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah kalurahan Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul terhadap pengembangan *home industry*. Kalurahan Kemiri memiliki beragam potensi dalam sektor usaha masyarakat dan kelompok masyarakat yakni, tepung mocaf, kripik olahan tepung mocaf, peyek, gaplek, lemet, olahan labu kuning, bakpia, batik sekar saga dan lain-lainnya. Dengan banyaknya beragam potensi yang ada tentunya diperlukan sebuah formula terkait bagaimana para pelaku *home industry* ini dapat terus produktif, berkembang, bahkan maju sebagai penggerak roda ekonomi desa. Pemerintah kalurahan sememiliki kewenangan yang salah satu diantaranya aspek pemberdayaan masyarakat desa. Diperlukan sebuah kapasitas dalam menjalankan otoritas. Kapasitas menjadi point penting dalam penelitian ini sekaligus tolak ukur sejauh mana nantinya para pelaku *home industri* di kalurahan Kemiri ini berkembang maju dan tidaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan *Home Industry* dan untuk mengetahui proses serta faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pengembangan *Home Industry*. Metode penelitian ini deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan perspektif Governabilitas, pemerintah kalurahan Kemiri memiliki otoritas untuk mendayagunakan pada kepentingan para pelaku UMKM. kapasitas pemerintah kalurahan Kemiri dalam menyadagunakan dan keberpihakan pada gerak ekonomi kalurahan cukup mumpuni. Dana besar yang dialihkan untuk pemberkuasaan ekonomi masyarakat kalurahan dinilai mampu menghadirkan ‘kalurahan’ untuk ‘warga’.

Hasil penelitian ini menjelaskan Intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Kemiri berwujud pada mengintegrasikan seluruh unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada satu wadah yang bernama Desa Preneur dan di bawah komando Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Terkhusus kelompok Batik Sekar Saga segera dihadirkan sebagai ciri khas dari kalurahan Kemiri dan mengisi produk UMKM batik khas Kalurahan Kemiri. Peran pemerintah kalurahan Kemiri untuk membantu akses pelaku UMKM diwujudkan dalam bentuk acara-acara atau event, pembuatan pameran tersendiri, fasilitasi produk untuk pameran, dan mewadahi berbagai produk nantinya pada *show room* atau griya UMKM yang berada di Telaga Saga. Kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan Kemiri dalam pelaksanaan pengembangan UMKM berupa kucuran dana guna lebih membantu dan lebih cepat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan percepatan pembangunan wadah UMKM. Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga yang dirasa sulit untuk dilakukan.

Kata kunci: Pemerintah Kalurahan, Home Industri, Kebijakan, dan Governabilitas

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan kewenangan terhadap desa untuk melaksanakan dan mengelola seluruh aset potensi yang dimiliki oleh desa sesuai dengan kewenangnya, secara umum definisi Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki beberapa azas yang melekat diantaranya rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Kewenangan desa sebagai basis kekuatan yang melegitimasi desa memiliki pembagian urusan yang dipersempit yakni, kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan yang dimiliki desa merupakan suatu instrumen dalam merumuskan kebijakan bagi pemerintah desa dan mengkonsolidasikan prakarsa lokal berbasis masyarakat yang berdampak langsung, seperti halnya yang dikemukakan oleh Charles Taylor (1992), misalnya, memahami rekognisi dalam dua pengertian:

“politik universalisme”, yakni proteksi terhadap otonomi individu, kelompok atau komunitas dengan cara menjamin hak-hak mereka; serta “politik perbedaan”, yakni proteksi terhadap identitas individu, kelompok atau komunitas dengan cara menghormati dan membolehkan mereka melindungi budayanya.

Pemahaman rekognisi bukan hanya saja dalam aspek menjaga dan melestarikan entitas prakarsa masyarakat, seperti halnya yang dikemukakan oleh Fraser (1996) melihat rekognisi dalam konteks perjuangan politik untuk melawan ketidakadilan. Tujuan rekognisi bukan sekadar memberikan pengakuan, penghormatan dan afirmasi terhadap identitas kultural yang berbeda, tetapi yang lebih besar adalah keadilan sosialekonomi. Pandangan konsepsi rekognisi di atas dapat dihipotesakan bahwa makna pengakuan terhadap menjaga identitas lokal dan keadilan sosial ekonomi, oleh karenanya rekognisi perlu menjadi tindak lanjut sebagai kebijakan, perencanaan dan program bagi pemerintah desa untuk keadilan sosial ekonomi seluruh masyarakat desa. Rekognisi dan kebijakan merupakan satu rangkaian bangunan sistem untuk meregulasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, pemahaman kebijakan terkadang hanya sebatas meregulasi sebagai legalitas tanpa disertai dengan intervensi program yang berkelanjutan. Pemerintah desa selaku pemangku kebijakan melalui peraturan desa yang disusun secara empiris hanya menyusun peraturan desa yang sifatnya legalitas administrasi semata, seperti peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Legitimasi rekognisi dalam kebijakan peraturan desa semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengangkat entitas lokal masyarakat yang ada sesuai dengan kewenangannya, seperti halnya meregulasi dalam potensi aktivitas ekonomi

masyarakat desa yakni *home industry*. Pemerintah desa dalam mendorong kemandiriannya tidak terlepas dari aspek gotongroyong bersama masyarakat melalui aktivitas *home industry*, pemerintah desa memiliki tugas penting dalam akses informasi, akses pasar, akses permodalan dan kapasitas sumber daya manusia para pelaku *home industry*.

Desa atau sebutan lain Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Kemiri terletak di sebelah utara Kalurahan Kemadang, Kalurahan Banjarejo, Kalurahan Ngestirejo dan sebelah barat Kalurahan Hargosari. Desa Kemiri memiliki 11 Padukuhan, 11 Rukun Warga dan 48 Rukun Tetangga. Masyarakat Kalurahan Kemiri yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Salah satu produk pertanian yang paling banyak ditemukan di Kalurahan Kemiri adalah singkong.

Kalurahan Kemiri memiliki beragam potensi yang dimiliki dalam sektor usaha masyarakat dan kelompok masyarakat yakni, tepung mocaf, kripik olahan tepung mocaf, peyek, gaplek, lemet, olahan labu kuning, bakpia, batik sekar saga dan lain- lainnya. Kalurahan kemiri secara tidak langsung dalam pengembangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui *home industry* telah ikut andil dalam mengintervensi kebijakan dalam aspek perencanaan, program, kegiatan dan sarana prasarana penunjang hingga akses pasar.

Dengan banyaknya beragam potensi yang ada tentunya diperlukan sebuah formula terkait bagaimana para pelaku *home industry* ini dapat terus produktif, berkembang, bahkan maju sebagai penggerak roda ekonomi desa. Pemerintah kalurahansetidaknya juga memiliki kewenangan yang salah satu diantaranya adalah aspek pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan kewenangan tentu diperlukan sebuah otoritas dan kapasitas pemerintah kalurahan.

Sebuah otoritas telah ada dan tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Spesifiknya ada di bab iv tentang kewenangan desa pasal 18. Ini otoritas yang dimiliki oleh pemerintah kalurahan (Kemiri) tentunya. Namun, tidak mudah begitu saja dalam menjalankan otoritasnya. Diperlukan sebuah kapasitas dalam menjalankan ataupun melaksanakan otoritas. Kapasitas ini lah yang menjadi point penting dalam penelitian ini sekaligus tolak ukur sejauh mana nantinya para pelaku *home industri* di kalurahan Kemiri ini berkembang maju dan tidaknya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang kapasitas pemerintah kalurahan kemiri dalam kebijakan pengembangan *home industry* masyarakat. Penelitian ini menggunakan perspektif Governabilitas dengan meletakkan perbuatan pemerintah hanyalah diletakkan sebagai objek yang didekati dengan pendekatan kapasitas dan otoritas pemerintah. Perspektif Governabilitas digunakan untuk menjelaskan kegagalan versus kesuksesan kebijakan pemerintah (Yunanto, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menyebabkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Home Industry Di Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan *Home Industry*.
2. Untuk mengetahui proses serta faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan pengembangan *Home Industry*.

D. Manfaat Penelitian

3. Secara Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memperkaya literasi keilmuan dan sumbangsih pengetahuan dalam bidang disiplin Ilmu Pemerintahan khususnya tentang Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan *Home Industry*.

4. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah instrumen/cara bagi desa lainnya di Indonesia dalam Kebijakan Pengembangan *Home Industry* dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mewujudkan kemandirian desa.

E. Literatur Review

Pada literatur review, peneliti akan menggambarkan beberapa penelitian mengenai kapasitas pemerintah desa yang berlokasi di Kalurahan Kemiri, KepanewonTanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta:

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuaris Wafom tahun 2018 berjudul ‘Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan – Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa’ menganalisis kapasitas pemerintah kalurahan Kemiri denganmelihat dari bagaimana pemerintah kalurahan memanfaatkan potensi desa yang berdampak pada pendapatan asli desa. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa pemahaman aparat pemerintah terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi kurang, usia aparat pemerintah banyak yang sudahtua, kemampuan menjalankan tugas pokok dan fungsi cukup baik.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Deri Beanal tahun 2018 berjudul ‘Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab. Gunungkidul D.I Yogyakarta’ berawal dari pengamatan peneliti selama kuliah

kerja nyata (KKN) bahwa pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik belum begitu nampak. Peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah desa.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Lien Maulina, Dede Kuswandi, Siti Yulia Irani, Hanna Daniati, Eka Rosiana berjudul 'Pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo Menuju Desapreneur' ber lokasi di Desa Wisata Pandanrejo (Dewa Pandan) Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Media Wisata, Volume 20, Nomor 2, November 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur kepada pengelola desa wisata, pengelola UMKM, masyarakat pelaku UMKM, dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo memiliki manfaat baik secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan, manfaat paling tinggi diberikan oleh bidang sosial. Upaya untuk menjadikan Desa Wisata Pandanrejo sebagai desapreneur antara lain melalui pengembangan desa preneur, yaitu dengan melalui aspek: kelompok dan keanggotaan wirausaha desa, kapasitas dan kualitas produk/ jasa, tata kelola keuangan dan administrasi, pembinaan dan pendampingan desa, *benchmarking* pemasaran dan promosi, keluasan dampak dan keberlanjutan.
8. Penelitian yang diberi judul '(SAKU) Sistem Akuntansi UMKM: Model *Cloud Accounting System* Sederhana sebagai Strategi Optimalisasi Pengembangan Desa Preneur' berfokus pada implementasi pengembangan desa preneur khususnya bagian keuangan. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2022, Vol. 2 No. 1,

Hal 171-

182. Latar belakang dalam penelitian ini menyebutkan memang banyak sekali kendala dalam implementasi desa preneur khususnya bagian keuangan dan minimnya sumber daya manusia. Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dan dengan model studi kasus ternyata memang banyak kendala dan tantangan dalam implementasinya. Rekomendasi dari penelitian ini membentuk sistem akuntansi sederhana dengan model *Cloud Accounting System*.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Hery Apriyadi Malo tahun 2018 berjudul ‘Pengelolaan Administrasi Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DIY’ mencoba melihat pengelolaan administrasi dalam menunjang pembangunan desa. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan dan menuliskan fakta-fakta dilapangan berkaitan dengan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan administrasi yang sudah baik. Hal ini dibuktikan dari kelengkapan data desa Kemiri yang mana setiap perangkat desa mengelola administrasi desa. Hasil ini tak terlepas dari kinerja yang bagus dari perangkat desa, namun hal yang perlu diperhatikan adalah harus melibatkan seluruh perangkat supaya semua dapat berkontribusi dalam pengelolaan administrasi.

10. Penelitian Yana Karyana yang diberi judul ‘Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa’ diterbitkan dalam Jurnal POPULIKA volume 11 nomor 1 tahun 2023 memperlihatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengerakan potensi ekonomi di desa. Penelitian ini berlokasi di Pangunharjo. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran peran BUMDes yang dikembangkan oleh Desa Pangunharjo dalam melakukan proses pemberdayaan. Dengan penelitian kualitatif digambarkan

strategi inovasi pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Temuan dari penelitian ini proses pemberdayaan yang dilakukan antara lain tahap pengkapasitasan, bimbingan dan pelatihan, serta peningkatan kerjasama. BUMDes melakukan identifikasi dan revitalisasi potensi yaitu kearifan lokal, ketiga, melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan, dan keempat, peran dan fungsi BUMDes Panggung Lestari dalam pemberdayaan adalah sebagai actor, inisiator, mediator, dan fasilitator berbasis *local community participation* (partisipasi masyarakat lokal).

11. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Angelina tahun 2022 berjudul ‘Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto’ meletakkan pemerintah kalurahan sebagai objek penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah terkait kapasitas pemerintah kalurahan sedangkan, subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Wonokerto, Pengurus UMKM dan Pelaku UMKM. Pada penelitian ini jumlah informan yaitu terdiri dari 6 orang. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan Teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa governabilitas pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan, pelatihan yang disediakan kurang variatif sesuai dengan kebutuhan UMKM, alat yang digunakan untuk menunjang proses produksi masih terbatas, belum adanya upaya dari pemerintah kalurahan untuk membantu mengatasi keterbatasan modal, serta pelaku UMKM yang kurang Sementara itu, hambatan pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM yaitu dikarenakan lemahnya pemasaran.

- 12.** Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nurjannah Simanjuntak tahun 2020 berjudul ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui *HomeIndustry* Keripik Pisang Di Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang’. Peneliti berfokus pada program pemberdayaan terhadap pengembangan potensi dan bakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan program dengan baik dalam pemberdayaan masyarakat melalui *Home Industry*, namun pemerintah desa memiliki tantangan yang diantaranya terbatasnya intervensi anggaran pemerintah dan akses pasar yang telah dilakukan pemerintah desa.
- 13.** Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Riyansyah tahun 2018 berjudul ‘Pemberdayaan Home Industry Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat’ peneliti ini berfokus pada program pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan kapasitas dan peran pemerintah desa melalui program pemberdayaan *home industry* mencakup, pembinaan, pelayanan dan pengembangan terhadap masyarakat, perlu menjadi catatan bagi pemerintah desa adalah dalam membaca tipologi masyarakat dikarenakan tipologi masyarakat merupakan basis pertanian atau bertani.
- 14.** Penelitian yang dilakukan oleh Hashiyatul Fadiah berjudul ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Pelaku Usaha Rumahan Melalui Pemanfaatan Media Sosial Di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa’ penelitian ini memiliki fokus peran pemerintah desa dalam akses pasar produk usaha rumahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan

pemerintah desa memfasilitasi pelatihan dan pendampingan.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Subhan Goma berjudul ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara’ penelitian ini berfokus pada pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan untuk Meningkatkan Pendapatan Desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menerangkan kebijakan yang dibuat pemerintah desa yakni fokus pada sektor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perlu menjadi catatan dalam pelaksanaan pemerintah desa belum melakukan strategi tertentu dalam menunjang peningkatan pendapatan desa.

Dari berbagai penelitian di atas, sepuluh penelitian menunjukkan dan mengarah akan bagaimana kapasitas pemerintah desa yang mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan belum maksimal. Belum ada yang menunjukkan dari sektor kebijakan yang berdasarkan prakarsa masyarakat. Maka dari itu, kebaruan dalam penelitian ini adalah menganalisis kapasitas pemerintah desa Kemiri, kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Y yang melihat dari sisi pengembangan *homeindustry*.

F. Kerangka Konseptual

1. Self Governing Community – Local Self Government

kedudukan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diletakan sebagai *hybrid* antara masyarakat yang berpemerintahan (*Self Governing Community*) dan pemerintahan lokal (*Local Self Government*). Desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan mengacu pada perseptif desa dari UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2. Sedangkan desa sebagai pemerintahan lokal mengacu pada perspektif pemerintahan dari UUD 1945 Pasal 18 ayat 7. Maka dari itu, dalam

UU No. 6/ 2014 adalah Undang-undang Desa, bukan Undang-undang tentang pemerintahan desa (Eko, 2015).

Melalui semangat UU desa, dengan menempatkan kombinasi masyarakat berpemerintahan dan pemerintahan lokal, artinya menempatkan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat. Dalam artian disini, rakyat di desa melalui pilkades membentuk pemerintah desa untuk memerintah desa (aparatur/ perangkat desa) agar melayani warga desa. Kunci dari pemberkuasaan, pemberdayaan, pengembangan, dan apapun itu adalah masyarakat desa. Sehingga, desa bukan sekadar rezim/ sistem pemerintahan namun sebagai basis sosial masyarakat (Eko, 2015).

Desa yang diartikan secara ringkas, lugas, dan jelas sebagai pemerintahan berbasis masyarakat, tentunya tidak serta merta melihat desa hanya sebagai unit pemerintahan terkecil, terbawah, dan terpencil. Namun, menempatkan desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, dengan kedudukan yang dipadukan campuran pemerintahan lokal dengan masyarakat berpemerintahan ini menjadikan desa memiliki masyarakat dan masyarakat memiliki desa. Ada rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan yang paling penting gotong-royong dalam membangun yang namanya desa.

2. Kewenangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberkuasaan, pemberdayaan, kemasyarakatan, atas kehendak dan prakarsa sesuai dengan konteks yang ada di desa. Dalam prespektif desa baru, *delivery* kewenangan dan program ditempatkan sebagai sebuah mandat. Desa, (pemerintah desa dan masyarakat) ditempatkan sebagai

pemegang kewenangan. Sehingga, peran desa sebagai aktor atau subjek utama yang merencanakan, membiayai, dan melaksanakan (Eko, S., et.al, 2014).

Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur, bermakna mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), bertanggung jawab merencanakan-menganggarkan-menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul, memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya. Mengurus, berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut (Eko, S., et.al, 2014).

Kewenangan mengatur dan mengurus ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan pemerintah, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Dalam mandat pembangunan seperti dijelaskan di atas, desa sendiri mempunyai kewenangan berskala lokal. Kewenangan berskala lokal ini muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, salah satunya dalam hal ekonomi lokal (Eko, S., et.al, 2014).

Konsep kewenangan dalam penelitian ini diletakan dalam lanskap pemerintah desa mengatur dan mengurus berdasarkan prakarsa lokal yang ada. Pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah desa Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, DIY. Pemeintah desa mengatur dan mengurus dalam salah satu fungsi, yakni pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Kontkes pemberdayaan dikerucutkan menjadi lebih kecil dalam hal ekonomi lokal, yakni home industri.

3. Governabilitas

Kemunculan Governabilitas berawal dari diskursus krisis demokrasi di eropa dan amerika, yang dalam hal itu dibarengi dengan krisis kapitalisme. Governabilitas adalah otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah (Yunanto, 2021). Governabilitas merupakan soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif (Huntington, 1975 dalam Yunanto, 2021). Pintu masuk dalam memahami governabilitas adalah dengan kekuasaan. Sehingga, pandangan dalam hal ini diletakan pada institusi pemegang kekuasaan.

Oleh karenanya, Kekuasaan dan kedaulatan saling terkait tata kelola pemerintahan (Firdaus dan Habbodin, 2022). Hal ini dilihat dari bagaimana proses pembentukan pemerintah. Di awali dari rakyat membentuk pemerintah melalui sebuah pemilihan, untuk memerintah negara – daerah – desa, agar supaya melayani warga. Proses memerintah dan menghadirkan kembali untuk warga menjadi titik awal melihat otoritas dan kapasitas pemerintah. Otoritas dari terbentuknya dan proses memerintah, kapasitas dari proses memerintah hingga menghadirkan kembali untuk warga.

struktur-institusi bekerja secara dinamis melakukan *transforming the state* melalui pelebagaan governabilitas. Ini terlihat dari bagaimana fungsi-fungsi utama pemerintah melembaga dalam legislasi dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah-parlemen, sekaligus bekerjanya otoritas memaksa (koersi) terhadap negara, warga, dan masyarakat. Pelebagaan governabilitas melakukan kanalisasi hak dan kepentingan beragam subjek, sekaligus melakukan limitasi kekuasaan politik, sehingga mengarahkannya menjadi otoritas, kekuatan, kapasitas, kewajiban (reponsibilitas) dan tanggungjawab (akuntabiitas)

(Yunanto, 2021).

Governabilitas dalam penelitian ini dimaksudkan dalam melihat akan pemerintah desa Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul, DIY menggunakan otoritas melalui kewenangannya. Ditambah lagi, dalam point penting disini, kapasitas dalam menghadirkan kewenangan berdasarkan prakarsa lokal untuk pengembangan home industri masyarakat desa.

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Home Industry Di Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam pengembangan *Home Industry*.
2. Faktor-Faktor Pendukung Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan *Home Industry*.
3. Kendala yang dihadapi dalam Pengembangan *Home Industry*

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya memuat tentang asas-asas yang memberikan tautan terhadap penelitian atas dunia empiris, oleh karena itu metode penelitian mencakup semua proses penelitian. Penelitian ini termaksud ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian. (Moleong, 2010:9)

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan

sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset. (Saifullah)

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Artinya penelitian ini akan memberikan uraian secara obyektif tentang masalah yang akan diteliti, kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Jenis penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang diamati. (Moleong, 2010:9)

2. Unit Analisis

Adapun obyek dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Home Industry. Lokasi yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

Subjek penelitian merupakan *informan* atau narasumber yang terkait dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan *informan* dengan cara teknik purposive yaitu, mengambil narasumber data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan *informan* yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah kalurahan dalam kebijakan pengembangan *home industry* yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, dalam penelitian ini perincian narasumber dapat dibagi sebagai berikut :

- i. Lurah Kalurahan Kemiri : 1 orang
- ii. Carik Kalurahan Kemiri : 1 orang

iii. Pelaku Home Industry : 4 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang akan dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam penelitian kualitatif. Observasi pada kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa pengelihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Rahardjo, 2011:3). Bahwa suatu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang diteliti secara langsung ke lokasi penelitian.

b. Wawancara mendalam

Wawancara suatu peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang (*interviewer*), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban dengan masalah penelitian. Wawancara paling tidak antara dua orang, satu pihak berperan dalam sebuah proses dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain (Fadhallah, 2021:5). Bahwa wawancara merupakan proses komunikasi antara dua pihak, bertanya kepada satu orang yang

diwawancarai paling tidak salah satu pihak mempunyai tujuan dalam tanya jawab.

c. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip (Murdiyanto, 2020:62). Bahwa dengan menggunakan metode dokumentasi data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan yang ada pada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan resmi seperti, buku, gambar, media cetak.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data suatu proses penting untuk menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi (Jogiyanto, 2018:72). Langkah- langkah dalam mengelaborasi data yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

i. Reduksi Data

Pengurangan data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrasikan dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi tertulis.

ii. Penyajian Data

Tampilan data melibatkan hasil dari reduksi data seperti matriks, grafik, bagan dan jaringan.

iii. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan dalam analisis data dapat dilakukan lewat berbagai macam teknik kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dari penjelasan di atas bahwa suatu cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk digunakan dalam berbagai solusi permasalahan.

BAB II
PROFIL KALURAHAN KEMIRI,
KAPANEWON TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Sejarah Kalurahan Kemiri

Sejak berlakunya maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kalurahan dan nama-namanya, Kemiri sudah sah menjadi Kalurahan. Aturan ini juga berlaku untuk semua kalurahan-kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Sejak Saat itu Kemiri dipimpin oleh lura atau kepala desa secara bergantian. Dari awal berdirinya kalurahan Kemirisampai sekarang sudah ada 6 orang lurah yang memimpin. Di Jawa umumnya Desa itu bernama Kalurahan, sedangkan Kepala desa disebut Lurah.

Sejak Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kebijakan Urusan keistimewaan pemerintah negara bagian/pemerintah kota dan Kalurahan, maka sejak 2020 kepala kalurahan diganti dengan sebutan lurah. Adapun lurah yang pernah memimpin Kalurahan Tanjungsari, Kemiri, Gunungkidul dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Daftar Nama Lurah Kemiri

No	Nama Lurah	Tahun
1	Ki Ponco Sentono	1912-1938
2	M.Ng. Radiyo Diharjo	1938-1983
3	Ki Tjipto Utomo	1984-2003
4	Kirdi	2004-2014
5	Samidi	2016-2021
6	Payadi	2022-Sekarang

Sumber: Profil Kalurahan Kemiri

B. Kondisi Geografis Kalurahan Kemiri

Kalurahan Kemiri ini berada di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini berada di 8.049977 lintang selatan dan 110.563512 bujur timur. Kawasan kalurahan Kemiri berupa perbukitan karst dengan lapisan tanah yang tipis. Kawasan ini berada di ketinggian 100-300 di atas permukaan laut. Kawasan ini juga merupakan wilayah pengembangan Gunung Seribu. Kalurahan ini juga berbatasan dengan kalurahan Giring, Mulo, Banjarejo, dan Kemandang. Adapun gambar peta wilayah dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Kemiri



Sumber: Profil Kalurahan Kemiri

C. Kondisi Demografis Kalurahan Kemiri

Jumlah penduduk kalurahan Kemiri sebanyak 4.700 jiwa. Terdiri dari 2.282 laki-laki dan 2.418 perempuan. Banyaknya penduduk usia produktif berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 di Kalurahan Kemiri sebanyak 3.129 jiwa, jumlah penduduk anak-anak sejumlah 737 jiwa, dan penduduk tua sejumlah 859 jiwa.

Dengan rasio ketergantungan sebesar 51% yang berarti setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Adapun untuk memudahkan pembaca terkait hal ini, dapat dilihat pada tabel 2.2 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di bawah ini

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kalurahan Kemiri Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	2782	18,55%
2.	Perempuan	2418	51,45%
Total		4.700	104.0%

Sumber: Profil Kalurahan Kemiri

D. Kondisi Ekonomi Kalurahan Kemiri

Kalurahan Kemiri mempunyai potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Kemiri tidaklah sama, secara potensi ekonomi Kalurahan Kemiri terbagi menjadi 3 wilayah besar, tentunya karena terbagi menjadi 3 wilayah besar potensi ekonomi sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertanian, UMKM dll, untuk wilayah Dusun Tengah mayoritas bertumpu pada sektor pertanian meskipun ada juga yang bergerak disektor lain seperti industri rumah tangga, untuk wilayah dusun timur yang secara mayoritas penduduknya berada pada sektor pemerintahan, dan bergerak di sektor swasta sehingga sangat diharapkan untuk wilayah dusun timur potensi dari sektor perdagangan, pertokoaan, dari ketiga wilayah ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kalurahan Kemiri dengan naiknya taraf pendapatan penduduk Kalurahan Kemiri.

E. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Kemiri

Secara administrasi Kalurahan Kemiri terbagi menjadi 11 (sebelas) Padukuhan dan terdiri dari 48 RT dan 11 RW tersebar di masing-masing Padukuhan. Adapun jumlah Padukuhan, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2. 3 Pembagian Wilayah Administrasi

No	Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dayakan I	1	4
2	Dayakan II	1	2
3	Karangnongko	1	5
4	Guyangan	1	5
5	Glagah	1	6
6	Kemiri	1	4
7	Gebang	1	4
8	Bareng	1	6
9	Ngasem	1	4
10	Panggung	1	4
11	Wates	1	4
Jumlah		11	48

Sumber: Profil Kalurahan Kemiri

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kalurahan Kemiri terdiri dari Lurah, Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan serta Staff Kalurahan. Berikut daftar nama dan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2. 4 Daftar Nama dan Pamong Kalurahan

No	Nama	Jabatan
1	Payadi	Lurah
2	Novika Dewi	Carik
3	Mardiyanto	Jogoboyo
4	Subandi	Ulu-ulu
5	Sumardi	Kamituwa
6	Sugimin	Danarta
7	Cahyo Wiji Hartanto	Kaur Tata Laksana
8	Majiyo	Pangripta
9	Surahjono	Dukuh Dayakan I
10	Mungkas Mulyono	Dukuh Dayakan II
11	Pamungkas Sedyo W	Dukuh Karangnongko
12	Mukiyat	Dukuh Guyangan
13	Diah Ajeng Titisari	Dukuh Glagah
14	Mujono	Dukuh Kemiri
15	Suti	Dukuh Gebang
16	Winarsih	Dukuh Bareng
17	Juwari	Dukuh Ngasem
18	Sukidi	Dukuh Panggang
19	Rahayuningsih	Dukuh Wates
20	Wasno	Staff
21	Suraji	Staff
22	Mujiyati	Staff
23	Sadiko	Staff
24	Sediyanto	Staff
25	Sugiriyanto	Staff

Sumber : Profil Kalurahan Kemiri

Selain para pamong kalurahan juga terdapat beberapa anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BamusKal) yang berjumlah 9 orang. Nama-nama tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2. 5 BamusKal Kalurahan Kemiri

No	Nama	Jabatan
1	Wagino	Ketua
2	Sumilir	Wakil Ketua
3	Sukamti	Sekretaris
4	Prawoto	Kabid Pemerintahan
5	Bangun F.W	Kabid Pemberdayaan Masyarakat
6	Sumari	Anggota
7	Wasno A	Anggota
8	Murniyati	Anggota
9	Puji Lestari	Anggota

Sumber : Profil Kalurahan Kemiri

Visi – Misi Lurah Kemiri disamping merupakan Visi-Misi Lurah Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kalurahan ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Kalurahan. Adapun VisiLurah Kemiri,sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KALURAHAN KEMIRI YANG HANDARBENI, IMAN, SEHAT, TERAMPIL, OBJEKTIF, RAMAH, INOVATIF”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memupuk rasa bangga sebagai warga Kalurahan Kemiri.
2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kalurahan Kemiri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
3. Mewujudkan birokrasi Pemerintah Kalurahan Kemiri yang bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah dan masyarakat Kalurahan Kemiri.
5. Memandang masyarakat dalam kedudukan yang sama sebagai warga KalurahanKemiri, tidak pilih kasih.
6. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjamin tidak adapungutan liar (pungli).
7. Melakukan inovasi untuk percepatan kemajuan Kalurahan Kemiri khususnya dalam bidang pariwisata serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kalurahan Kemiri juga memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

(LPMD) yang terbentuk atas inisiatif masyarakat desa. LPMD Kemiri ini menjadi mitrapemerintah kalurahan Kemiri dalam pembangunan kalurahan. Adapun anggota LPMD Kemiri ini berjumlah 16 orang. Beberapa daftar nama yang tergabung dalam LPMD dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2. 6 LPMD Kemiri

No	Nama	Jabatan
1	Sri Alam, S.Pd	Kepala
2	Siman	Wakil Ketua
3	Onyus Wahyudi	Sekretaris
4	Hartini	Bendahara
5	Pujiyo	Seksi Sarana dan Prasarana
6	Wahono	Seksi Sarana dan Prasarana
7	Sutarno	Seksi Perekonomian
8	Sri Wigati	Seksi Perekonomian
9	Susi Lestari	Seksi Kesejahteraan Rakyat
10	Suryadi	Seksi Kesejahteraan Rakyat
11	Eka Ariyanto	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
12	Tugiman	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
13	Tukijem	Seksi Pemberdayaan dan Perempuan
14	Maryuni	Seksi Pemberdayaan dan Perempuan
15	Kelik Triyanto	Seksi Pemuda Olahraga dan Kesenian
16	Nugroho Dwi	Seksi Pemuda Olahraga dan Kesenian

Sumber : Profil Kalurahan Kemiri

F. Profil Usaha Mikro Kecil Menengah Kelompok Batik Sekar Saga

Kelompok Batik Sekar Saga merupakan kelompok batik yang diadakan oleh Kalurahan Kemiri. Kelompok batik ini pada awalnya adalah untuk mendukung jalannya pariwisata di desa kemiri yaitu wisata telaga. Dalam mendukung hal tersebut, kalurahan membuat beberapa program di bidang umkm yaitu kelompok batik yang akan di kelola oleh 4 padukuhan yaitu padukuhan wates, panggang, bareng, dan ngasem. Kelompok batik diikuti oleh ibu-ibu yang terdiri dari 4 padukuhan tersebut. Saat ini tercatat ada 12 anggota yang aktif di kelompok batik Sekar Saga.

Kelompok Batik Sekar Saga pada mulanya difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan Kemiri. Fasilitas yang diberikan berupa alat dan bahan untuk produksi batik. Selain itu, ada juga beberapa narasumber atau instruktur batik supaya kelompok ini mengetahui bagaimana batik secara utuh dan mempunyai nilai tersendiri bagi kemajuan kalurahan Kemiri. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Batik ini seperti halnya pertemuan rutin. Pertemuan rutin biasanya dilakukan seminggu sekali dengan hanya membatik saja. Instruktur juga terus mendampingi dan akan melakukan pelatihan lebih lanjut.

Sementara ini kelompok Batik Sekar Saga masih terkendala dengan sumber daya manusia (SDM). Ada suatu waktu dalam pertemuan kadang banyak orang yang datang dan kadang sedikit. Artinya belum ada konsistensi anggota dalam kelompok ini. Bagusnya kelompok ini sudah dapat menampilkan sebuah produk dengan ciri khas batik kontemporer. Adapun beberapa gambar di bawah ini dapat melihat progres dari kelompok Batik Sekar Saga.

Gambar 2. 2 Proses membatik



Gambar 2. 3 Produk dari Kelompok Batik Sekar Saga





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemerintah kalurahan Kemiri, kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, DIY berupaya dan mengarahkan kebijakannya untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau home industri, khususnya pada penelitian ini kelompok batik Sekar Saga pada perwujudan Desa Preneur. Dilihat dari segi kewenangannya, yakni dalam pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah kalurahan Kemiri memiliki otoritas untuk mendayagunakan pada kepentingan para pelaku UMKM.

Selain itu, melihat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) Kemiri pada tahun 2022 dan APBKal 2023 kita dapat menyimpulkan bahwasanya kapasitas pemerintah kalurahan Kemiri dalam menyadagunakan dan keberpihakan pada gerak ekonomi kalurahan cukup mumpuni. Dana besar yang dialihkan untuk pemberkuasaan ekonomi masyarakat kalurahan dinilai mampu menghadirkan ‘kalurahan’ untuk ‘warga’.

Berkaca pada hal di atas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan guna menggambarkan “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Home Industri Di Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul ?” di bawah ini;

1. Intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan Kemiri berwujud pada mengintegrasikan seluruh unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada satu wadah yang bernama Desa Preneur dan di bawah komando Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Terkhusus kelompok Batik Sekar Saga segera dihadirkan sebagai ciri khas dari kalurahan Kemiri dan mengisi produk UMKM batik khas Kalurahan Kemiri.
2. Peran pemerintah kalurahan Kemiri untuk membantu akses pelaku UMKM

diwujudkan dalam bentuk acara-acara atau event, pembuatan pameran tersendiri, fasilitasi produk untuk pameran, dan mewadahi berbagai produk nantinya pada *show room* atau griya UMKM yang berada di Telaga Saga.

3. Kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan Kemiri dalam pelaksanaan pengembangan UMKM berupa kucuran dana guna lebih membantu dan lebih cepat mengerakan roda perekonomian masyarakat dan percepatan pembangunan wadah UMKM. Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga yang dirasa sulit untuk dilakukan.

B. Saran

Setelah melihat kondisi lapangan, kemudian membandingkan dengan data, lalu menemukan temuan, dan menganalisa temuan lapangan. Rekomendasi yang dapat penulis berikan pemerintah kalurahan sudah seyogyanya untuk terus mensinergikan para pelaku UMKM dan mulai mengaktifkan website kalurahan ataupun membuat sistem penjualan secara online dalam satu atap. Kemudian, pelatihan management bisnis harus tetap dilaksanakan buka membuka *mind set* para pelaku UMKM guna bersaing di era pasar bebas serta membawa khas dari kalurahan Kemiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Eko, Sutoro. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru; (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Eko, S., Khasanah, TI, Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., & Qomariyah, P. (2014). *desa membangun indonesia*. FPPD. Yogyakarta.
- Fadhallah, R. A., & Psi, S. (2021). *Wawancara*. UNJ PRESS: Jakarta.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional. Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN.

Sumber dari Jurnal/ Skripsi:

- Aleksius Beatus Ringgi Soka, (2012). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor Home Industry. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 1, No. 1.
- Anggelina, R. (2022). Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta . *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Deri Beanal. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Kemiri, Kec Tanjungsari, Kab. Gunungkidul D.I Yogyakarta. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Yogyakarta.
- Dewiyanti, S., Wijaya, W. (2022). (SAKU) Sistem Akuntansi UMKM: Model Cloud Accounting System Sederhana sebagai Strategi Optimalisasi Pengembangan Desa Preneur. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*. 2(1).
- Fahmi Riyansyah, (2018). Pemberdayaan Home Industry dalam Penigkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 3, Nomor 2.
- Fitri Nurjannah Simanjuntak, (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Keripik Pisang Di Desa Patumbak

I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Hadi, Praditha. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Tentang Alokasi Dana Desa, di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DIY). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Yogyakarta.

Habbodin, M., & Firdaus, M. (2022). Kekuasaan Dan Kedaulatan Memerintah.

Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) , 3 (1), 50-62.

Hery Apriyadi, Malo. (2018). Pengelolaan Administrasi Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Di Yogyakarta. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Yogyakarta.

Karyana, Y. (2023). Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa. *POPULIKA*, 11(1), 41-49.

Hashiyatul Fadiah, (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Pelaku Usaha Rumahan Melalui Pemanfaatan Media Sosial Di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* Vol.3, No. 1.

Maulina, L., Kuswandi, D., Nugraha, S. Y. I., Daniati, H., & Rosiana, E. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo Menuju Desapreneur. *Media Wisata*, 20(2), 233-248.

Subhan Goma, (2015). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Politico*.

Yanuaris, Wafom. (2018). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Potensi Desa Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Yogyakarta.

Yunanto, SE. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan.

Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume , 2 .

Sumber Dari Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

LAMPIRAN





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat: Jl. Timoho No. 317, Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989. Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gery Paten Sinuray
Nomor Mahasiswa : 16520261
Judul : Kebijakan Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Umkm Batik di Kelurahan Kemiri Kapanewon Tanjung Sari Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing :
Mulai Bimbingan : 30/8/2022

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
30/8/2022	-Perbaikan penulisan pada Judul Proposal -Perubahan Kata dan Istilah	
3/9/2022	-Perbaikan pada Metode Penelitian	
5/9/2022	* - Harus adanya korelasi antara proposal penelitian dalam mazhab Timoho (Sg)	
7/9/2022	* Acc Proposal	
10/12/2022	* Masukkan data penelitian pada bab 2	
3/1/2023	+ Revisi bab 3 mengenai hasil analisis penelitian	
3/2/2023	- Acc Skripsi	

--	--	--

Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

.....

Dosen Pembimbing :

.....



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 060/PEM/J/II/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada ;

Yth Utami Sulistiana, S.P.,M.P.

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

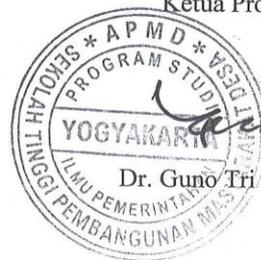
Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Gery Paten Sinuray
No. Mahasiswa : 16520261
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 31 Maret 2022
Judul Proposal : Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Home Industri

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.